



BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah telah diarahkan untuk menjamin ketersediaan anggaran bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sementara itu, pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan terkait pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum seluruhnya dapat ditangani, baik karena alasan administratif, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun karena alasan masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan di daerah ini.

Gambaran umum pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010-2014 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah kurun waktu tiga tahun (2015-2018). Gambaran umum dan analisis pengelolaan keuangan daerah tahun 2010-2014 mencakup : (1) struktur pendapatan beserta komponennya; (2) struktur belanja daerah beserta komponennya; (3) trend perkembangan pembiayaan defisit/surplus; dan (4) trend besaran penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Secara umum pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada kurun waktu 2010-2014, telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahannya. Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain ditunjukkan RPJMD Provinsi oleh kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dicapainya berbagai indikator kinerja pembangunan daerah, baik indikator kinerja ekonomi makro maupun sektoral. Meskipun demikian, dalam hal pengelolaan pendapatan daerah belum seluruhnya dapat dioptimalkan terutama pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjukkan oleh rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk memacu daerah agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan yang lebih baik yang ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan semakin berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, kemampuan daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan APBD dan kemandirian suatu daerah.

a. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2014

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2010-2014, antara lain dapat dicermati dari target dan realisasi APBD setiap tahunnya, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2010-2014 Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut.



Tabel 106. Rerata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 - 2014

| No. | Uraian | 2010 (Rp) | 2011 (Rp) | 2012 (Rp) | 2013 (Rp) | 2014 (Rp) | Rerata Pertumb uhan (%) |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 1.055.173.629.666.03 | 1.288.979.728.356,16 | 1.811.984.327.624.41 | 1.972.559.882.627.94 | 2.189.559.757.998.23 | 20.65 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 339.360.819.004.03 | 346.169.830.959,16 | 439.184.485.917.41 | 514.857.031.059.96 | 599.942.751.257.23 | 15.66 |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 202.929.980.966.00 | 262.509.201.604.00 | 336.932.584.305.00 | 408.107.145.035.00 | 457.838.397.672.00 | 22.76 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 51.035.765.321.00 | 18.543.869.680.00 | 19.160.705.298.00 | 24.471.158.962.00 | 18.244.034.338.00 | -14.52 |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14.103.892.280.00 | 13.488.191.495.00 | 25.046.619.688.00 | 23.843.794.855.00 | 23.315.540.453.00 | 18.58 |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang Sah | 71.291.180.437.03 | 51.628.568.180,16 | 58.044.576.626.41 | 58.434.932.207.96 | 100.544.796.794.23 | 14.40 |
| 1.2. | Dana Perimbangan dan Penyesuaian | 691.637.810.662.00 | 817.385.234.124.00 | 1.308.767.073.981.00 | 1.451.899.059.568.00 | 1.549.728.926.741.00 | 23.99 |
| 1.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak | 71.842.992.276.00 | 82.744.077.124.00 | 115.207.475.481.00 | 126.593.343.568.00 | 123.630.558.241.00 | 15.49 |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum | 595.762.419.000.00 | 700.836.557.000.00 | 869.882.871.000.00 | 981.035.741.000.00 | 1.053.636.011.000.00 | 15.48 |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 24.032.400.000.00 | 33.804.600.000.00 | 34.659.800.000.00 | 53.266.770.000.00 | 58.750.010.000.00 | 26.79 |
| 1.2.4. | Dana Penyesuaian | - | - | 289.016.927.500.00 | 291.003.205.000.00 | 313.712.347.500.00 | 4.25 |
| 1.3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 24.175.000.000.00 | 125.424.663.273.00 | 64.032.767.726.00 | 5.803.792.000.00 | 39.888.080.000.00 | 216.55 |
| 1.3.1 | Hibah | 24.175.000.000.00 | 84.741.046.746.00 | 63.657.767.726.00 | 5.803.792.000.00 | 39.888.080.000.00 | 180.51 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ***) | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus****) | - | 38.728.571.000.00 | - | - | - | 0.00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | - | 1.955.045.527.00 | - | - | - | 0.00 |
| 1.3.6 | Pendapatan Lainnya | - | - | 375.000.000.00 | - | - | 0.00 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra (diolah dengan menggunakan regresi linear) Tahun 2015



Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 20,65 persen. Penyumbang terbesar pendapatan daerah dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tenggara bersumber dari dana perimbangan rerata sebesar 23,99 persen. Sedangkan sumber utama pertumbuhan pendapatan daerah dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tenggara berasal dari dana transfer pemerintah pusat, baik dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) rerata sebesar 15,48 persen, dana alokasi khusus (DAK) rerata sebesar 26,79 persen, maupun dana transfer lainnya. Sementara sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh di bawah target yang ditetapkan hanya mencapai rata-rata 15,66 persen setiap tahun dari target yang ditetapkan sebesar 20,65 persen setiap tahunnya.

Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerah, maka perlu dioptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 (lima) tahun terakhir antara lain: (1) Data obyek dan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim, (2) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pajak dan retribusi daerah, (3) Kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi daerah, (4) Rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dan (5) belum maksimalnya penagihan pajak. Hal ini berarti bahwa berbagai upaya untuk mengefektifkan penggalan sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat lambat laun dapat dikurangi. Di samping itu, perlu terobosan melalui berbagai alternatif peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari pos pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan penduduk dan faktor-faktor lainnya serta kemampuan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010-2014, maka proyeksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya berkisar antara sebesar 20,65 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan dana perimbangan diproyeksikan sekitar 23,99 persen setiap tahunnya.

b. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015-2018

Beberapa kondisi yang mempengaruhi Pendapatan daerah secara langsung adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, regulasi, iklim usaha yang kondusif, keamanan dan stabilitas sosial politik, serta kebijakan pemerintah daerah. Dengan asumsi semua kondisi tersebut di atas berada pada tingkat yang optimum, dan tidak ada perubahan regulasi atau regulasi baru yang bersifat kontraproduktif dengan kelancaran pengelolaan pendapatan daerah, maka diprediksi pendapatan daerah akan terus meningkat secara signifikan sebagaimana dalam tabel berikut ini.



Tabel 107. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 - 2018

| No. | Uraian | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 2.368.943.419.790.75 | 2.557.731.134.977.62 | 2.746.518.850.164.56 | 2.935.306.565.351.50 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 678.753.021.418.00 | 759.132.154.087.91 | 839.511.286.757.81 | 919.890.419.427.72 |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 521.865.165.037.67 | 582.318.062.721.17 | 642.770.960.404.67 | 703.223.858.088.17 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 19.708.628.572.67 | 19.250.293.092.67 | 18.791.957.612.67 | 18.333.622.132.67 |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.337.572.430.33 | 21.472.032.812.83 | 20.606.493.195.33 | 19.740.953.577.83 |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang Sah | 114.841.655.377.35 | 136.091.765.461.26 | 157.341.875.545.17 | 178.591.985.629.08 |
| 1.2. | Dana Perimbangan dan Penyesuaian | 1.677.760.206.190.00 | 1.798.241.132.570.00 | 1.918.722.058.950.00 | 2.039.202.985.330.00 |
| 1.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak | 130.233.541.856.67 | 134.445.083.236.67 | 138.656.624.616.67 | 142.868.165.996.67 |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum | 1.151.938.014.333.34 | 1.243.814.584.333.34 | 1.335.691.154.333.34 | 1.427.567.724.333.34 |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 72.982.403.333.33 | 85.027.508.333.33 | 97.072.613.333.33 | 109.117.718.333.33 |
| 1.2.4. | Dana Penyesuaian | 322.606.246.666.67 | 334.953.956.666.67 | 347.301.666.666.67 | 359.649.376.666.67 |
| 1.3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 12.430.192.182.67 | 357.848.319.67 | 11.714.495.543.33 | 23.786.839.406.33 |
| 1.3.1 | Hibah | 12.680.192.182.67 | 795.348.319.67 | 11.089.495.543.33 | 22.974.339.406.33 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ***) | - | - | - | - |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus****) | - | - | - | - |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - | - |
| 1.3.6 | Pendapatan Lainnya | 250.000.000.00 | 437.500.000.00 | 625.000.000.00 | 812.500.000.00 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra (diolah dengan menggunakan regresi linear) Tahun 2015



3.1.2. Neraca Daerah

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Secara umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dalam bentuk pendekatan eksternal dan internal yang dalam pelaksanaannya tercermin dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, dalam alokasi anggaran pada berbagai bidang dan program dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung yang secara rata-rata di atas 40 persen.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah juga memperlihatkan perbaikan yang ditandai dengan opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD), dimana pada tahun 2011 dan 2012 secara berturut mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2013 dan 2014 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Gambaran umum proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 108. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014

| No | Uraian | (2010) (%) | (2011) (%) | (2012) (%) | (2013) (%) | (2014) (%) |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| A | Belanja Tidak Langsung | 597.811.704.897.00 (53.11%) | 699.679.828.321.03 (52.69%) | 1.163.247.381.155.18 (67.84%) | 1.056.378.511.677.13 (58.46%) | 1.114.072.137.546.53 (53.34%) |
| 1 | Belanja Pegawai | 312.193.784.967.00 (52.22%) | 346.075.530.658.00 (49.46%) | 421.500.308.693.00 (36.23%) | 431.361.209.603.00 (40.83%) | 458.968.694.881.00 (41.20%) |
| 2 | Belanja Bunga | - | - | 14.762.534.437.00 (1.27%) | 18.329.791.536.55 (1.74%) | 22.627.810.251.78 ((2.03%) |
| 3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| 4 | Belanja Hibah | 7.860.207.000.00 (1.31%) | 9.616.003.468.00 (1.37%) | 390.194.203.450.00 (33.54%) | 295.628.063.500.00 (27.99%) | 324.556.945.982.00 (29.13%) |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 75.477.399.621.00 (12.63%) | 18.176.487.725.73 (2.60%) | - | - | - |
| 6 | Belanja Bagi Hasil | 79.660.625.009.00 (13.33%) | 73.047.479.632.00 (10.44%) | 104.260.187.982.83 (8.96%) | 214.814.429.291.31 (20.33%) | 203.217.977.515.75 (18.24%) |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | 120.671.756.500.00 (20.19%) | 250.939.326.837.30 (35.86%) | 232.530.146.592.35 (19.99%) | 96.245.017.746.27 (9.11%) | 104.700.708.916.00 (9.40%) |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | 1.947.931.800.00 (0.33%) | 1.825.000.000.00 (0.26%) | - | - | - |
| B | Belanja Langsung | 527.876.245.834.00 (46.89%) | 628.344.871.639.03 (47.31%) | 551.561.176.225.000 (32.16%) | 750.613.025.057.00 (41.54%) | 974.527.586.475.00 (46.66%) |
| 1 | Belanja Pegawai | 64.253.625.779.00 (12.17%) | 62.281.696.919.00 (9.91%) | 72.313.876.719.00 (13.11%) | 62.484.468.794.00 (8.32%) | 58.057.282.583.00 (5.96%) |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 228.258.763.062.00 (43.24%) | 224.565.347.569.03 (35.74%) | 275.044.116.461.00 (49.87%) | 257.411.674.296.00 (34.29%) | 362.977.174.093.00 (37.25%) |
| 3 | Belanja Modal | 235.363.856.993.00 (44.59%) | 341.497.827.151.00 (54.35%) | 204.203.183.045.00 (37.02%) | 430.716.881.967.00 (57.38%) | 553.493.129.799.00 (56.80%) |
| TOTAL A+B | | 1.125.687,950.731.00 | 1.328.024.699.960.06 | 1.714,808,557,380,18 | 1.806.991.536.734.13 | 2.088.599.724.021.53 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2015



Tabel 109. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Tenggara

| No | Uraian | (2009) (Rp) | (2010) (Rp) | (2011) (Rp) |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A | Belanja Tidak Langsung | 321.714.549.107.00 | 372.509.358.043.00 | 398.687.754.190.00 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 286.532.406.394.00 | 312.193.784.967.00 | 346.075.530.658.00 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan**) | 25,102,492,267.00 | 50,631,119,538.00 | 45.058,602,471.00 |
| 3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 1.246.000.000.00 | 1.324.000.000.00 | 1.352.000.000.00 |
| 4 | Belanja pemungutan Pajak Daerah**) | 8.833.650.446.00 | 8.360.453.538.00 | 6.201.621.061.00 |
| B | Belanja Langsung | 722.849.540.498.00 | 386.954.473.963.00 | 476.212.925.431.00 |
| 1 | Belanja Honorarium PNS**) | 129,358,189,719.00 | 41,773,415,461.00 | 15,156,785,321.00 |
| 2 | Belanja Uang Lembur**) | 1,364,922.000.00 | 732,740,766.00 | 745,928,372.00 |
| 3 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 3,797,310.000.00 | 2,436,600.000.00 | 50.000.000.00 |
| 4 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) | 3,971,464,500.00 | 4,783,507.000.00 | 3,367,213,490.00 |
| 5 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 3.276.971.113.00 | 3.766.023.930.00 | 4.251.034.861.00 |
| 6 | Belanja Makanan dan Minuman Pegawai***) | 60,880,978,464.00 | 21,121,583,673.00 | 34,206,867,693.00 |
| 7 | Belanja pakaian dinas dan atributnya**) | 107,460,500.00 | 1,642,335,425.00 | 671,367,909.00 |
| 8 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) | 40,732,683.030.00 | 1,931,486,225.00 | 1,918,749,900.00 |
| 9 | Belanja Perjalanan Dinas**) | 177,595,993,421.00 | 73,402,924,490.00 | 74,347,150,734.00 |
| 10 | Belanja Perjalanan Pindah Tugas | - | - | - |
| 11 | Belanja Pemulangan Pegawai | - | - | - |
| 12 | Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) | 301.763.385.751.00 | 235.363.856.993.00 | 341.497.827.151.00 |
| | TOTAL | 1.044.563.907.605.00 | 759.463.832.006.00 | 874.900.679.621.00 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012



Tabel 110. Proyeksi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018

| No | Uraian | (2015) (%) | (2016) (%) | (2017) (%) | (2018) (%) |
|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| A | Belanja Tidak Langsung | 1.062.057.433.184.29 (47.33%) | 1.131.974.208.905.92 (44.82%) | 1.235.216.024.777.93 (43.49%) | 1.338.457.840.649.95 (43.03%) |
| 1 | Belanja Pegawai | 474.745.123.913.66 (44.70%) | 493.479.317.007.66 (43.59%) | 512.213.510.101.66 (41.47%) | 530.947.703.195.66 (39.67%) |
| 2 | Belanja Bunga | 26.438.654.556.56 (2.49%) | 30.371.292.463.95 (2.68%) | 34.303.930.371.34 (2.78%) | 38.236.568.278.73 (2.86%) |
| 3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - |
| 4 | Belanja Hibah | 271.155.813.509.34 (25.53%) | 238.337.184.775.34 (21.06%) | 205.518.556.041.34 (16.64%) | 172.699.927.307.34 (12.90%) |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | - | - | - | - |
| 6 | Belanja Bagi Hasil | 273.055.321.129.53 (25.71%) | 322.534.215.895.98 (28.49%) | 372.013.110.662.44 (30.12%) | 421.492.005.428.89 (31.49%) |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | 16.662.520.075.20 (1.57%) | 47.252.198.762.98 (4.17%) | 111.166.917.601.16 (9.00%) | 175.081.636.439.33 (13.08%) |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | - | - | - | - |
| B | Belanja Langsung | 1.181.867.006.169.02 (52.67%) | 1.393.350.211.294.02 (55.18%) | 1.604.833.416.419.02 (56.51%) | 1.772.350.092.728.02 (56.97%) |
| 1 | Belanja Pegawai | 50.028.615.229.33 (4.23%) | 42.900.318.161.33 (3.08%) | 35.772.021.093.33 (2.23%) | 28.643.724.025.33 (1.62%) |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 386.410.712.582.00 (32.69%) | 430.377.241.398.00 (30.89%) | 474.343.770.214.00 (29.56%) | 474.343.770.214.00 (26.76%) |
| 3 | Belanja Modal | 745.427.678.357.69 (63.07%) | 920.072.651.734.69 (66.03%) | 1.094.717.625.111.69 (68.21%) | 1.269.362.598.488.69 (71.62%) |
| TOTAL A + B | | 2.243.924.439.353.31 | 2.525.324.420.199.94 | 2.840.049.441.196.95 | 3.110.807.933.377.97 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra (diolah dengan menggunakan regresi linear), Tahun 2015



Berdasarkan Tabel 108 di ketahui bahwa proyeksi belanja pembangunan daerah atau belanja langsung dari tahun 2015-2018 terus mengalami peningkatan terutama untuk belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung mengalami penurunan dibandingkan dari belanja pembangunan daerah atau belanja langsung tahun 2010-2014 yang mengalami peningkatan terutama untuk belanja pegawai.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu tiga tahun disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 111. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur Provinsi Sulawesi Tenggara**

| No | Uraian | Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Prosentase |
|----|-----------------------|---|--|------------------|
| | | (a) | (b) | (a) / (b) x 100% |
| 1 | Tahun Anggaran (2009) | 1.044.563.907.605.00 | 1.123.906.281.733,15 | 92,94% |
| 2 | Tahun Anggaran (2010) | 759.463.832.006.00 | 1.153.043.579.578,66 | 65,87% |
| 3 | Tahun Anggaran (2011) | 874.900.679.621.00 | 1.483.351.185.480,72 | 58,99% |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2009, alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 92,94 persen dari total belanja daerah sebesar Rp 1.123.906.281.733,15 pada tahun 2010 mengalami penurunan sekitar 27,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2010 mencapai 65,87 persen dari total belanja daerah.



Tabel 112. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Sulawesi Tenggara

| No | Uraian | (2009) (Rp) | (2010) (Rp) | (2011) (Rp) | Rerata Pengeluaran (%) |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| A | Belanja Tidak Langsung | 446.271.524.605.00 | 597.811.704.897.00 | 699.679.828.321.03 | 25.50 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 286.532.406.394.00 | 312.193.784.967.00 | 346.075.530.658.00 | 9.91 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 1.246.000.000.00 | 1.324.000.000.00 | 1.352.000.000.00 | 4.19 |
| 3 | Belanja Bunga | - | - | - | - |
| 4 | Belanja Bagi hasil | 60.160.658.250.00 | 79.660.625.009.00 | 73.047.479.632.00 | 12.06 |
| B | Belanja Langsung | 673.428.859.619.15 | 527.876.245.834 | 628.344.871.639.03 | (1.29) |
| 1 | Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis. | 9,378,842,613.00 | 381.200.000.00 | 475,340.000.00 | (35.62) |
| 2 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 3,797,310.000.00 | - | 50.000.000.00 | 0.00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor Seperti Listrik, Air, Telepon dan Sejenisnya) | 8,806,329,806.00 | 5,331,758,303.00 | 6,961,121,293.00 | (4.45) |
| 4 | Belanja Sewa Gedung Kantor(Yang Telah Ada Kontrak Jangka Panjangnya) | 1,979,708.093.00 | 3,792,141,996.00 | 3,148,974,683.00 | 37.30 |
| 5 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Yang Telah Ada Kontrak Jangka Panjangnya) | 3,172.082.000.00 | 1,968,178,360.00 | 549,766,900.00 | (55.01) |
| | Dst ... | - | - | - | - |
| C | Pembiayaan Pengeluaran | 4,205,897,509.00 | 27,355,628,847.66 | 155,326,485,520.66 | 509.11 |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - |
| 2 | Pembayaran pokok utang | - | 12,555,628,847.66 | 78,633,398,539.00 | 263.14 |
| | Dst... | | | | |
| | TOTAL (A + B + C) | 1.123.906.281.733.15 | 1.153.043.579.578.66 | 1.483.351.185.480.72 | 15.62 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012



Tabel 113. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Sulawesi Tenggara

| No | Uraian | Data Tahun Dasar (Rp) | Tingkat pertumbuhan (%) | Proyeksi | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Tahun n+1 (Rp) | Tahun n+2 (Rp) | Tahun n+3 (Rp) | Tahun n+4 (Rp) | Tahun n+5 (Rp) |
| A | Belanja TidakLangsung | 1,362,873,337,497.00 | | 1,499,160,671,246.70 | 1,649,076,738,371.37 | 1,813,984,412,208.51 | 1,995,382,853,429.36 | 2,194,921,138,772.29 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 418,751,392.096.18 | | 460,626,531,305.80 | 506,689,184,436.38 | 557,358,102,880.02 | 613.093,913,168.02 | 674,403,304,484.82 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 163,592.000.000.00 | | 179,951,200.000.00 | 197,946,3200 | 217,740,952.000.00 | 239,515.047,200.00 | 263,466,551,920.00 |
| 3 | Belanja Bunga | 31,250.000.000.00 | | 34,375.000.000.00 | 37,812,500.000.00 | 41,593,750.000.00 | 45,753,125.000.00 | 50,328,437,500.00 |
| 4 | Belanja Bagi Hasil | 225,513,915,619.00 | | 248.065,307,180.90 | 272,871,837,898.99 | 300,159.021,688.89 | 330,174,923,857.78 | 363,192,416,243.56 |
| B | Belanja Langsung | 676,492,935,130.00 | | 744,142,228,643.00 | 818,556,451,507.30 | 900,412.096,658.03 | 990,453,306,323.83 | 1.089,498,636,956.22 |
| 1 | Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis. | 575,161,400.00 | | 632,677,540.00 | 695,945,294.00 | 765,539,823.40 | 842.093,805.74 | 926,303,186.31 |
| 2 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 60,500.000.00 | | 66,550.000.00 | 73,205.000.00 | 80,525,500.00 | 88,578.050.00 | 97,435,855.00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor Seperti Listrik, Air, Telepon dan Sejenisny) | 8,422,956,764.53 | | 9,265,252,440.98 | 10,191,777,685.08 | 11,210,955,453.59 | 12,332.050,998.95 | 13,565,256.098.84 |
| 4 | Belanja Sewa Gedung Kantor(Yang Telah Ada Kontrak Jangka Panjangnya) | 3,810,259,366.43 | | 4,191,285,303.07 | 4,610,413,833.38 | 5.071,455,216.72 | 5,578,600,738.39 | 6,136,460,812.23 |
| 5 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Yang Telah Ada Kontrak Jangka Panjangnya) | 665,217,949.00 | | 731,739,743.90 | 804,913,718.29 | 885,405.090.12 | 973,945,599.13 | 1.071,340,159.04 |
| | Dst Sesuai Kriteria Wajib | | | | | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015-2018

| No | Uraian | Data Tahun Dasar (Rp) | Tingkat pertumbuhan (%) | Proyeksi | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Tahun n+1 (Rp) | Tahun n+2 (Rp) | Tahun n+3 (Rp) | Tahun n+4 (Rp) | Tahun n+5 (Rp) |
| | Mengikat | | | | | | | |
| C | Pengeluaran Pembiayaan | 42.085.000.000.00 | | 46,293,500.000.00 | 50,922,850.000.00 | 56.015,135.000.00 | 61,616,648,500.00 | 67,778,313,350.00 |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | | | | |
| 2 | Pembayaran pokok utang | 27,200.000.000.00 | | 29,920.000.000.00 | 32,912.000.000.00 | 36,203,200.000.00 | 39,823,520.000.00 | 43,805,872.000.00 |
| | TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA | 2,961,292,675,822.14 | | 3,257,421,943,404.35 | 3,583,164,137,744.79 | 3,941,480,551,519.27 | 4,335,628,606,671.19 | 4,769,191,467,338.32 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis pembiayaan terlebih dahulu diuraikan data-data pendukung yaitu (1) Defisit riil anggaran dan (2) Realisasi sisa lebih.

3.2.2.1. Defisit Riil Anggaran

Tahun 2010 hingga tahun 2014, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara selalu mengalami defisit. Selisih antara defisit/surplus ditambah dengan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah, disebut sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenan. Defisit riil anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010-2014 adalah sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.



Tabel 114. Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014

| NO. | Uraian | (2010) (Rp) | (2011) (Rp) | (2012) (Rp) | (2013) (Rp) | (2014) (Rp) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Realisasi Pendapatan Daerah | 1.055.173.629.666.03 | 1.288.979.728.356,16 | 1.811.984.327.624.41 | 1.972.559.882.627.96 | 2.189.559.757.998.23 |
| | Dikurangi Realisasi : | | | | | |
| 2. | Belanja Daerah | 1.125.687.950.731.00 | 1.328.024.699.960.06 | 1.714.896.024.366.29 | 1.812.944.606.734.13 | 2.088.599.724.021.53 |
| 3. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 27.355.628.847.66 | 155.326.485.520.66 | 22.592.978.174.00 | 45.466.890.005.38 | 75.448.000.000.00 |
| A | Defisit Riil | 70.514.321.064.97 | 39.044.971.603.90 | 74.495.325.084.12 | 114.148.385.888.45 | 25.512.033.976.70 |
| | Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan: | 106.197.607.236.66 | 198.733.017.524.03 | | | |
| 4. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran Sebelumnya | 31.279.097.203.00 | 8.327.657.324.03 | 4.360.761.199.47 | 98.085.508.583.59 | 317.828.055.979.04 |
| 5. | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| 6. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang diPisahkan | - | - | - | - | - |
| 7. | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | 190.000.000.000.00 | 19.203.513.300.00 | 106.017.751.874.00 | 13.175.960.925.00 |
| 8. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 74.787.208.979.66 | 405.360.200.00 | 25.909.000.00 | 674.000.000.00 | - |
| 9. | Penerimaan Piutang Daerah | 131.301.054.00 | - | - | - | - |
| B | Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah | 106.197.607.236.66 | 198.733.017.524.03 | 23.590.183.499.47 | 204.777.260.457.59 | 331.004.016.904.04 |
| A-B | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | 8.327.657.324.03 | 4.361.560.399.47 | 50.905.141.584.65 | (90.628.874.569.14) | (305.491.982.927.34) |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2009 - 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2012 s/d 2014 sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan realisasi PAD mengalami peningkatan dan perubahan nomenclature serta sikap kehati-hatian pengguna anggaran setiap SKPD. Defisit anggaran yang terjadi karena belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian besar atau seluruhnya ditutupi oleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, tanpa perlu melakukan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan atau melakukan pinjaman daerah.

Komposisi penutup defisit riil anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2011 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 115. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014

| No. | Uraian | Proporsi dari total defisit riil | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | (2010) (%) | (2011) (%) | (2012) (%) | (2013) (%) | (2014) (%) |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran Sebelumnya | 31.279.097.203.00 | 8.327.657.324.03 | 4.360.761.199.47 | 98.085.508.583.59 | 317.828.055.979.04 |
| 2. | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| 3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - | - | - |
| 4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | 190.000.000.000.00 | 19.203.513.300.00 | 106.017.751.874.00 | 13.175.960.925.00 |
| 5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 74.787.208.979.66 | 405.360.200.00 | 25.909.000.00 | 674.000.000.00 | - |
| 6. | Penerimaan Piutang Daerah | 131.301.054.00 | - | - | - | - |
| 7. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | 8.327.657.324.03 | 4.361.560.399.47 | 98.085.508.583.59 | 317.828.055.979.04 | 356.516.050.821.74 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2015

3.2.2.2. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Persentase realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terbesar terjadi pada tahun 2009, disebabkan oleh adanya penghematan belanja atau akibat lainnya yaitu sebesar 74,86 persen dan adanya kegiatan lanjutan sebesar 25,14 persen, demikian pula pada tahun 2009, persentase terbesar disebabkan karena adanya penghematan belanja atau akibat lainnya namun mengalami penurunan menjadi 68,35 persen dan kegiatan lanjutan menjadi 31,65 persen. Pada tahun 2010 realisasi sisa lebih perhitungan anggaran mengalami pergeseran, persentase terbesar disebabkan karena adanya kegiatan lanjutan yaitu sebesar 64,35 persen dan untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan yaitu sebesar 35,65 persen. Realisasi SiLPA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-2011 dapat di lihat pada tabel berikut.



Tabel 116. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara

| No. | Uraian | (2009) | | (2010) | | (2011) | | Rata-rata pertumbuhan*) |
|-----|---|--------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | |
| 1. | Jumlah SiLPA | 107.910.610.790.05 | 100 | 31.279.097.203.00 | 100 | 8.327.657.324.03 | 100 | |
| 2. | Pelampauan Penerimaan PAD | - | | - | | - | | |
| 3. | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | - | | - | | - | | |
| 4. | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | - | | - | | - | | |
| 5. | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | - | | - | | - | | |
| 6. | Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan | 3.018,109,111.00 | 100 | - | | - | | |
| 7. | Kegiatan Lanjutan | 78,607,324,685.00 | 100 | 51,834,603,665.00 | 100 | - | | |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

Defisit atau surplus anggaran pendapatan belanja daerah diakibatkan karena adanya selisih antara pendapatan dan belanja. Bilamana terjadi surplus anggaran, maka dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan dan sebaliknya jika terjadi defisit anggaran, maka dibiayai dari penerimaan pembiayaan. Struktur anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, (2) pencairan dana cadangan (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) penerimaan pinjaman dan (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup : (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal pemerintah daerah, (3) pembayaran pokok hutang dan (4) pemberian pinjaman.



3.2.2.3 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Tabel 117. Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014

| No. | Uraian | 2010 (Rp) | 2011 (Rp) | 2012 (Rp) | 2013 (Rp) | 2014 (Rp) |
|-----|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Saldo Kas Neraca Daerah | 16.766.643.888.00 | 19.474.098.714.47 | 75.008.015.561.59 | 313.659.982.370.04 | 328.658.985.191.99 |
| | Dikurangi: | | | - | - | - |
| 2. | Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan | 80.327.872.990.00 | 35.552.367.060.00 | 4.879.145.565.00 | 27.176.820.357.00 | 20.031.980.568.90 |
| 3. | Kegiatan Lanjutan | 51.834.603.665.00 | - | - | - | - |
| | Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran | (115.395.832.767.00) | (16.078.268.345.53) | 98.085.508.583.59 | 317.828.055.979.04 | 356.516.050.821.74 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2015

3.2.2.4 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Tabel 118. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018

| No | Uraian | Data tahun dasar (Rp) | Tingkat pertumbuhan (%) | Proyeksi | | | |
|----|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp) |
| 1. | Saldo Kas Neraca Daerah | 330.850.597.669.04 | 4.27% | 366.825.490.166.29 | 396.431.473.989.12 | 399.392.072.371.40 | 406.764.697.403.43 |
| | Dikurangi: | | | | | | |
| 1. | Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan | 14.291.984.813.00 | 5.70% | 16.066.336.150.29 | 19.350.146.987.93 | 19.678.528.071.69 | 18.034.188.957.46 |
| 2. | Kegiatan Lanjutan | | | | | | |
| | Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran | 316.558.612.856.04 | 4.24% | 350.759.154.016.00 | 377.081.327.001.19 | 379.713.544.299.71 | 388.730.508.445.97 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2015



3.2.3. Analisis Neraca Daerah

Kemampuan keuangan daerah diketahui dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap neraca daerah. Analisis neraca daerah dimaksud, terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Untuk memudahkan analisis neraca daerah, perlu diketahui gambaran perkembangan neraca daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 119. Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Per 31 Desember Tahun 2010-2014

| Uraian | Tahun (Rp) | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | PER 31 DESEMBER 2010 | PER 31 DESEMBER 2011 | PER 31 DESEMBER 2012 | PER 31 DESEMBER 2013 | PER 31 DESEMBER 2014 |
| ASET | | | | | |
| ASET LANCAR | | | | | |
| Kas dan Bank | | | | | |
| Kas di Kas Daerah | 7.698.475.464.00 | 4.900.677.785,47 | 75.008.015.561.59 | 313.659.982.370.04 | 328.658.985.191.99 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 8.857.247.924.03 | 5.636.686.029.00 | 4.404.795.562.00 | 137.706.205.00 | 944.312.832.00 |
| Kas di Bendahara penerimaan | 210.920.500 | 164.659.820.00 | 346.633.445.00 | 98.816.873.00 | 296.668.635.50 |
| Kas di Bendahara BLUD | 0.00 | 8.772.075.080.00 | 18.832.287.875.00 | 16.954.092.221.00 | 29.848.958.313.00 |
| Investasi Jangka Pendek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Piutang | | 0.00 | | | |
| Piutang pajak daerah | 8.441.235.089.00 | 10.882.878.560.00 | 12.573.991.183.00 | 15.039.985.213.00 | 15.175.259.423.00 |
| Piutang retribusi daerah | 718.072.197.00 | 48.254.600.00 | 31.262.040.00 | 89.062.600.00 | 566.285.968.00 |
| Piutang lainnya | 17.309.884.141.00 | 40.433.480.870,55 | 30.462.611.841.65 | 34.177.813.360.00 | 6.710.529.422.00 |
| Piutang BLUD | | 0.00 | 0.00 | | |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Persediaan | 2.339.992.937,50 | 2.290.112.948.00 | 2.169.363.123.00 | 2.998.330.044.00 | 5.318.947.610.67 |
| Belanja dibayar dimuka | 765.802.666,67 | 760.848.329.00 | 823.042.603.00 | 975.785.507.00 | 962.187.000.00 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 46.341.630.919,20 | 73.889.674.022.02 | 144.652.003.234.24 | 384.131.574.393.04 | 388.482.134.396.16 |
| | | | | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | | |
| Investasi Nonpermanen | | | | | |
| Investasi Nonpermanen - Dana bergulir | 0.00 | 0.00 | | | |



| Uraian | Tahun (Rp) | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | PER 31 DESEMBER 2010 | PER 31 DESEMBER 2011 | PER 31 DESEMBER 2012 | PER 31 DESEMBER 2013 | PER 31 DESEMBER 2014 |
| Investasi Nonpermanen Lainnya | 11.010.702.864.00 | 10.666.598.364 | 10.640.689.364.00 | 9.763.259.178.70 | 8.109.422.908.40 |
| Investasi Permanen | | 0.00 | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 114.015.958.400,17 | 120.026.981.475,74 | 66.611.676.471.18 | 91.270.346.717.04 | 135.883.354.113.40 |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 125.026.661.264,17 | 130.693.579.839,74 | 77.252.365.835.18 | 101.033.605.895.74 | 143.992.777.021.80 |
| ASET TETAP | | | | | |
| Tanah | 510.793.381.255.00 | 506.218.325.755.00 | 1.969.304.413.387.00 | 4.111.757.153.508.00 | 4.133.447.117.533.00 |
| Peralatan dan Mesin | 240.884.984.197.00 | 264.656.674.347.00 | 275.391.946.873.00 | 336.838.995.439.31 | 315.803.180.671.83 |
| Gedung dan Bangunan | 398.814.336.278.00 | 406.334.410.636.00 | 638.142.367.586.79 | 644.846.070.463.24 | 690.982.250.385.00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 575.332.569.646.00 | 662.066.490.067.00 | 707.843.337.145.08 | 771.572.457.985.23 | 1.050.742.199.230.23 |
| Aset Tetap Lainnya | 12.162.981.025.00 | 5.373.049.300.00 | 5.802.029.000.00 | 6.369.911.765.00 | 5.640.556.319.00 |
| Konstruksi dan Pengerjaan | 101.571.352.906.00 | 254.319.623.245.00 | 107.642.277.989.34 | 437.941.138.632.74 | 624.360.162.542.74 |
| JUMLAH ASET TETAP | 1.839.559.605.207.00 | 2.098.968.573.350.00 | 3.704.126.371.981.21 | 6.309.325.727.793.52 | 6.820.975.466.682.04 |
| DANA CADANGAN | | | | | |
| Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUMLAH DANA CADANGAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASET LAINNYA | | | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Tuntutan Perbendaharaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Tagihan Tuntutan Ganti Rugi | 0.00 | 485.164.166,67 | 485.164.166.67 | 536.011.500.00 | 536.011.500.00 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Aset Tak Berwujud | 628.917.000.00 | 628.917.000.00 | 628.917.000.00 | 628.917.000.00 | 628.917.000.00 |
| Aset Lain-Lain | 0.00 | 91.743.224.600.00 | 116.817.017.663.79 | 30.658.989.163.79 | 30.658.989.163.79 |



| Uraian | Tahun (Rp) | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | PER 31 DESEMBER 2010 | PER 31 DESEMBER 2011 | PER 31 DESEMBER 2012 | PER 31 DESEMBER 2013 | PER 31 DESEMBER 2014 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 628.917.000.00 | 92.857.305.766,67 | 117.931.098.830.46 | 31.823.917.663.79 | 31.823.917.663.79 |
| | | | | | |
| TOTAL ASET | 2.011.556.814.390,37 | 2.396.409.132.978,43 | 4.043.961.839.881.09 | 6.826.314.825.746.09 | 7.385.274.295.763.79 |
| | | | | | |
| KEWAJIBAN | | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK) | 8.228.066.064.00 | 14.947.879.495.00 | 159.590.415.00 | 12.884.835.544.00 | 2.288.467.196.00 |
| Utang Perhitungan Pihak ketiga (PPK) | 72.099.806.926.00 | 20.604.487.566.00 | 4.719.555.150.00 | 14.291.984.813.00 | 17.743.513.372.90 |
| Utang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kab/Kota | 26.265.790.789.06 | 29.503.595.486.00 | 96.803.529.322.31 | 47.991.394.716.00 | 51.039.826.030.16 |
| Utang Bunga | 0.00 | 3.692.601.522,33 | 6.582.995.605.81 | 4.893.714.777.87 | 4.589.152.765.12 |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri | 0.00 | 0.00 | 27.200.000.000.00 | 53.450.000.000.00 | 62.200.000.000.00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 2.810.495.625.00 | 11.592.565.772,43 | 3.169.785.648.00 | 5.593.542.265.00 | 6.393.309.358.00 |
| Utang BLUD | 0.00 | 0.00 | | | |
| Pendapatan Diterima di Muka | | | | | 80.210.000.00 |
| Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 109.404.159.404.06 | 80.341.129.842,64 | 138.635.456.141.12 | 139.105.472.115.87 | 144.334.478.722.18 |
| | | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | |
| Utang Pemerintah Pusat | 0.00 | 190.000.000.000.00 | 182.003.513.300.00 | 234.571.265.175.00 | 185.547.226.099.40 |
| Utang Dalam Negeri | 0.00 | 0.00 | | | |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | 0.00 | 0.00 | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0.00 | 190.000.000.000.00 | 182.003.513.300.00 | 234.571.265.175.00 | 185.547.226.099.40 |
| TOTAL KEWAJIBAN | 109.404.159.404.06 | 270.341.129.842,64 | 320.638,969.441.12 | 373.676.737.290.87 | 329.881.704.821.58 |
| | | | | | |
| EKUITAS DANA | | | | | |
| EKUITAS DANA LANCAR | | | | | |



| Uraian | Tahun (Rp) | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | PER 31 DESEMBER 2010 | PER 31 DESEMBER 2011 | PER 31 DESEMBER 2012 | PER 31 DESEMBER 2013 | PER 31 DESEMBER 2014 |
| Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SiLPA) | 8.327.657.324.03 | 4.361.560.399,47 | 98.085.508.583.59 | 317.828.055.920.04 | 356.516.050.821.74 |
| Pendapatan yang ditangguhkannya | 210.920.500.00 | 164.659.820.00 | 346.633.445.00 | 137.706.205.00 | 944.312.832.00 |
| Cadangan Piutang | | | | | |
| Cadangan Persediaan | | | | | |
| Cadangan Belanja yang Ditanggihkan | 764.802.666,67 | 760.848.329.00 | | 975.785.507.00 | 962.187.000.00 |
| Cadangan Piutang | 26.469.191.427,50 | 51.364.614.030,55 | 43.067.865.064.65 | 49.306.861.173.00 | 22.452.074.813.00 |
| Cadangan Persediaan | 2.339.992.937,50 | 2.290.112.948.00 | 2.169.363.123.00 | 2.998.330.044.00 | 5.318.947.610.67 |
| Cadangan Belanja Dibayar Dimuka | 0.00 | 0.00 | 823.042.603.00 | | |
| Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran | | | | | |
| Hutang jangka pendek | (101.176.093.340.06) | (65.393.250.347,64) | (138.475.865.762.12) | (126.220.636.571.87) | (142.046.011.526.18) |
| JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR | (63.063.528.484,86) | (6.451.454.820,62) | 6.016.547.093.12 | 245.026.102.277.17 | 244.147.561.551.23 |
| EKUITAS DANA INVESTASI | | | | | |
| Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | 125.026.661.264,17 | 130.693.579.839,74 | 77.252.365.835.18 | 101.033.605.895.74 | 143.992.777.021.80 |
| Diinvestasikan dalam Aset Tetap | 1.839.559.605.207.00 | 2.098.968.573.350.00 | 3.704.126.371.981.21 | 6.309.325.727.793.52 | 6.820.975.466.682.04 |
| Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | 628.917.000.00 | 92.857.305.766,67 | 117.931.098.830.46 | 31.823.917.663.79 | 30.007.172.887.49 |
| Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang | 0.00 | (190.000.000.000.00) | (182.003.513.300.00) | (234.571.265.175.00) | (185.547.226.099.40) |
| JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI | 1.965.215.183.471,17 | 2.132.519.458.956,41 | 3.717.306.323.346.85 | 6.207.611.986.178.05 | 6.809.428.190.491.93 |
| EKUITAS DANA CADANGAN | | | | | |
| Diinvestasikan dalam Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EKUITAS | 1.902.151.654.986,31 | 2.126.068.004.135,79 | 3.723.322.870.439.97 | 6.452.638.088.455.22 | 7.053.575.752.043.16 |



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015-2018

| Uraian | Tahun (Rp) | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | PER 31 DESEMBER 2010 | PER 31 DESEMBER 2011 | PER 31 DESEMBER 2012 | PER 31 DESEMBER 2013 | PER 31 DESEMBER 2014 |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 2.011.555.814.390,37 | 2.396.409.133.978,43 | 4.043.961.839.881.09 | 6.826.314.825.746.09 | 7.383.457.456.864.74 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah aset pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.011.555.814.390,37, pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp. 2.396.409.132.978,43, pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 4.043.961.839.881,09, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 6.826.314.825.746,09, dan pada tahun 2014 terus meningkat sebesar Rp. 7.385.274.295.763,79. dan pada jumlah kewajiban pada tahun 2010 sebesar Rp. 109.404.159.404,06, pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp. 270.341.129.842,64, pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 320.638.969.441,12, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 373.676.737.290,87, dan pada tahun 2014 terus meningkat sebesar Rp. 329.881.704.821,58.

Sedangkan pada jumlah kewajiban dan ekuitas pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.011.555.814.390,37, pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp. 2.396.409.133.978,43, pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 4.043.961.839.881,09, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 6.826.314.825.746,09, dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 7.383.457.456.864,74. Berdasarkan angka-angka pada tabel, peningkatan tersebut antara lain disebabkan proporsi belanja modal dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014.



**Tabel 120. Rerata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2011**

| No. | Uraian | Rerata Pertumbuhan (%) |
|--------|--|------------------------|
| 1. | ASET | |
| 1.1. | ASET LANCAR | (16.07) |
| 1.1.1. | Kas | 40.72 |
| 1.1.2. | Piutang | (66.13) |
| 1.1.3. | Persediaan | 15.65 |
| 1.2. | ASET TETAP | (11.20) |
| 1.2.1. | Tanah | (0.23) |
| 1.2.2. | Peralatan dan mesin | (12.33) |
| 1.2.3. | Gedung dan bangunan | 0.55 |
| 1.2.4. | Jalan, irigasi, dan jaringan | (15.33) |
| 1.2.5. | Aset tetap lainnya | 24.76 |
| 1.2.6. | Konstruksi dalam pengerjaan | (102.18) |
| 1.3. | ASET LAINNYA | 79.06 |
| 1.3.1. | Tagihan penjualan angsuran | - |
| 1.3.2. | Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah | - |
| 1.3.3. | Kemitraan dengan pihak kedua | - |
| 1.3.4. | Aset tak berwujud | - |
| | JUMLAH ASET DAERAH | (13.31) |
| 2. | KEWAJIBAN | |
| 2.1. | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | (76.44) |
| 2.1.1. | Utang perhitungan pihak ketiga | (153.18) |
| 2.1.2. | Uang muka dari kas daerah | - |
| 2.1.3. | Pendapatan diterima dimuka | - |
| 3. | EKUITAS DANA | |
| 3.1. | EKUITAS DANA LANCAR | |
| 3.1.1. | SILPA | 60.71 |
| 3.1.2. | Cadangan piutang | (116.34) |
| 3.1.3. | Cadangan persediaan | 19.15 |
| 3.2. | EKUITAS DANA INVESTASI | |
| 3.2.1. | Diinvestasikan dalam aset tetap | (11.20) |
| 3.2.2. | Diinvestasikan dalam aset lainnya | 29.11 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | (13.31) |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah aset ataupun jumlah kewajiban dan ekuitas dana sekitar 13,31 persen. Berdasarkan neraca daerah tahun 2009-2011, untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio likuiditas yaitu untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah



dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan analisis rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Analisis rasio keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 121. Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 - 2011

| NO | Uraian | (2009) (%) | (2010) (%) | (2011) (%) |
|------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Rasio lancar (<i>current ratio</i>) | 162.86 | 42.36 | 91.97 |
| 2. | Rasio quick (<i>quick ratio</i>) | 151.66 | 39.52 | 26.48 |
| 3. | Rasio total hutang terhadap total aset | 1.83 | 5.44 | 11.28 |
| 4. | Rasio hutang terhadap modal | 1.99 | 5.95 | 12.88 |
| 5. | Rata-rata umur piutang | - | - | - |
| 6. | Rata-rata umur persediaan | - | - | - |
| dst. | Rasio(lainnya) | - | - | - |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, rasio likuiditas pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dihitung dengan menggunakan rasio lancar atau *current ratio* dan *quick ratio*. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan *rasio quick* = (aktiva lancar–persediaan) dibagi kewajiban jangka pendek. Dari kedua cara tersebut, dapat dilihat bahwa rasio likuiditas atau kemampuan daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rata-rata sebesar lebih dari 90 persen. Hal ini berarti hutang jangka pendek pemerintah daerah dapat ditutupi dengan aktiva lancar yang ada. Rasio solvabilitas atau kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dapat dihitung dengan dua cara yaitu : (1) rasio total hutang terhadap total aset dan (2) rasio hutang terhadap total ekuitas. Kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa hutang pemerintah daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat tertutupi oleh aset dan ekuitas yang dimiliki oleh daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.



3.3.3. Analisis Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama tiga (3) tahun kedepan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama. Kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018 digambarkan pada tabel berikut :

Penghitungan kerangka pendanaan dan rencana penggunaannya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 122. Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018

| No. | Uraian | Proyeksi | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp) |
| 1. | Pendapatan | 2,296,875,3 48,648.32 | 2,526,562,88 3,513.15 | 2,779,219, 171,864.47 | 3,057,141.0 89.050.91 |
| 2. | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | | | | |
| 3. | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 1,737,192,3 23.35 | 1,910,911,55 5.69 | 2,102,002, 711.25 | 2,312,202,9 82.38 |
| | Total penerimaan | 2,298,612,5 40,971.67 | 2,528,473,79 5.068.84 | 2,781,321, 174,575.72 | 3,059,453,2 92.033.29 |
| | Dikurangi: | | | | |
| 4. | Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama | 2,518,556.0 39,878.67 | 2,770,411,64 3,866.54 | 3,047,452, 808,253.19 | 3,352,198.0 89.078.51 |
| | Kapasitas riil kemampuan keuangan | (219,943,49 8,907.00) | (241,937,848, 797.70) | (266,131,6 33,677.47) | (292,744,7 97.045.22) |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra

Catatan Koreksi : kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2015 – 2018 yang disesuaikan dengan Target penerimaan yang dikelola daerah di kurangi belanja pegawai.



3.3.3. Analisis Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama tiga (3) tahun kedepan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama. Kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018 digambarkan pada tabel berikut :

Penghitungan kerangka pendanaan dan rencana penggunaannya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 122. Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018

| No. | Uraian | Proyeksi | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp) |
| 1. | Pendapatan | 2,296,875,348,648.32 | 2,526,562,883,513.15 | 2,779,219,171,864.47 | 3.057,141.089.050.91 |
| 2. | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | | | | |
| 3. | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 1,737,192,323.35 | 1,910,911,555.69 | 2,102.002,711.25 | 2,312,202,982.38 |
| | Total penerimaan | 2,298,612,540,971.67 | 2,528,473,795.068.84 | 2,781,321,174,575.72 | 3.059,453,292.033.29 |
| | Dikurangi: | | | | |
| 4. | Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama | 2,518,556.039,878.67 | 2,770,411,643,866.54 | 3.047,452,808,253.19 | 3,352,198.089.078.51 |
| | Kapasitas riil kemampuan keuangan | (219,943,498,907.00) | (241,937,848,797.70) | (266,131,633,677.47) | (292,744,797.045.22) |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra

Catatan Koreksi : kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2015 – 2018 yang disesuaikan dengan Target penerimaan yang dikelolah daerah di kurangi belanja pegawai.



Tabel 123. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018

| No | Uraian | Proyeksi | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp) |
| I | Kapasitas riil kemampuan keuangan Rencana alokasi pengeluaran prioritas I | 2.241.100.617.846.10 | 2.516.913.277.377.11 | 2.820.307.202.861.22 | 3.154.040.520.893.74 |
| II.a | Belanja Langsung | 1.008.117.334.281.20 | 1.108.929.067.709.32 | 1.219.821.974.480.25 | 1.341.804.171.928.28 |
| II.b | Pembentukan dana cadangan | - | - | - | - |
| | Dikurangi: | | | | |
| II.c | Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | 448.990.459.167.80 | 493.889.505.084.58 | 543.278.455.593.04 | 597.606.301.152.34 |
| II.d | Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama | 58.795.000.000.00 | 64.674.500.000.00 | 71.141.950.000.00 | 78.256.145.000.00 |
| II | Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d) | 500.331.875.113.40 | 550.365.062.624.74 | 605.401.568.887.21 | 665.941.725.775.94 |
| | Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) | 1.740.768.742.732.70 | 1.966.548.214.752.37 | 2.214.905.633.974.00 | 2.488.098.795.117.80 |
| | Rencana alokasi pengeluaran prioritas II | - | - | - | - |
| III.a | Belanja Tidak Langsung | 1.065.802.586.875.16 | 1.172.382.845.562.67 | 1.289.621.130.118.94 | 1.418.583.243.130.84 |
| | Dikurangi: | | | | |
| III.b | Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | 568.728.575.210.40 | 625.601.432.731.44 | 688.161.576.004.58 | 756.977.733.605.04 |
| III | Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) | 497.074.011.664.76 | 546.781.412.831.23 | 601.459.554.114.36 | 661.605.509.525.79 |
| | Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)* | 1.243.694.731.067.94 | 1.419.766.801.921.13 | 1.613.446.079.859.65 | 1.826.493.285.592.01 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2015

Tabel 123, menunjukkan bahwa rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,243,694,731,067.94, Selanjutnya untuk tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.1,419,766,801,921.13, tahun 2017 Rp.1,613,446,079.859.65, dan tahun 2018 sebesar Rp.1,826,493,285,592.01. Berdasarkan angka-angka pada tabel 123, mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk periode REVIEW RPJMD Tahun 2015-2018.

**Tabel 124. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018**

| No. | Jenis Dana | Alokasi | | | | | | | |
|-----|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | |
| | | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp |
| 1. | Prioritas I | 29,37 | 475.441.299.781 | 43,42 | 875.145.512.817 | 32,98 | 668.159.786.799 | 35,61 | 851.151.674.628 |
| 2. | Prioritas II | 45,40 | 734.890.170.373 | 42,31 | 852.784.765.646 | 41,65 | 843.966.267.922 | 34,38 | 821.861.565.058 |
| 3. | Prioritas III | 25,23 | 408.303.869.988 | 14,27 | 287.530.413.139 | 25,37 | 514.112.255.874 | 30,01 | 717.431.220.241 |
| | Total | 100 | 1.618.635.340.142 | 100 | 2.015.460.691.602 | 100 | 2.026.238.310.595 | 100 | 2.390.444.459.928 |

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2015

Tabel di atas menggambarkan belum begitu tingginya kemampuan fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membiayai pembangunan daerah, maka kebijakan-kebijakan yang perlu diambil guna mengoptimalkan pendapatan daerah, antara lain :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan baru.
2. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak.
3. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana.
4. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.
5. Meningkatkan dana dari pusat diluar DAU dan DAK ke daerah.
6. Meningkatkan kontribusi Badan usaha Milik Daerah (BUMD).



Tabel 125
Kebijakan Alokasi Anggaran
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015-2018

| No. | Kelompok Prioritas | Proyeksi | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| | KELOMPOK PRIORITAS I | | | | |
| 1 | Dinas Pendidikan | 160,548,975.06 | 168,590,429.65 | 192,384,361.31 | 212,640,268.41 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 25,943,575.50 | 29,276,491.00 | 33,157,763.50 | 37,581,788.00 |
| 3 | RSUD Bahteramas | 90,015,359.00 | 153,478,885.00 | 100,456,616.00 | 129,585,875.00 |
| 4 | Rumah Sakit Jiwa | 3,186,266.00 | 10,288,007.00 | 9,788,770.00 | 9,972,616.05 |
| 5 | Dinas PU | 468,180,102.00 | 483,963,507.00 | 501,579,319.50 | 517,647,477.28 |
| 6 | BAPPEDA | 14,715,549.60 | 12,743,954.56 | 14,650,890.02 | 17,807,492.02 |
| 7 | Dinas Perhubungan & KOMINFO | 14,804,013.00 | 15,728,824.00 | 15,436,135.00 | 15,975,547.00 |
| 8 | Badan Lingkungan Hidup | 3,185,080.00 | 9,798,606.00 | 9,370,847.75 | 5,858,416.81 |
| 9 | Badan Pemb. Perempuan dan KB | 9,057,206.00 | 16,230,973.40 | 18,897,358.98 | 17,276,615.48 |
| 10 | Dinas Sosial | 5,782,826.00 | 5,750,001.00 | 9,748,680.21 | 10,875,066.54 |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi | 1,145,500.00 | 2,291,780.00 | 10,845,665.00 | 13,257,182.00 |
| 12 | Dinas Koperasi dan UMKM | 2,821,082.90 | 4,591,127.20 | 6,884,788.82 | 8,109,635.91 |
| 13 | Badan Penanaman Modal Daerah Dan PTSP | 3,578,450.00 | 3,735,302.00 | 24,898,275.00 | 6,541,230.00 |
| 14 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 6,112,974.00 | 7,031,070.00 | 8,086,729.00 | 8,085,729.00 |
| 15 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 5,500,420.00 | 5,000,000.00 | 5,667,230.00 | 5,365,300.00 |
| 16 | Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa | 8,843,820.00 | 16,042,100.00 | 9,479,000.00 | 9,179,000.00 |
| 17 | Badan Perpustakaan & Arsip | 3,790,300.00 | 7,938,262.00 | 5,261,666.00 | 4,796,994.00 |



| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Daerah | | | | |
| 18 | Dinas Pertanian dan Perternakan | 31,030,263.00 | 77,106,956.45 | 88,678,952.82 | 102,002,193.29 |
| 19 | Dinas Perkebunan & Holtikultura | 12,823,935.00 | 31,717,592.00 | 34,573,025.00 | 37,754,915.00 |
| 20 | Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan | 6,442,691.00 | 7,707,259.00 | 9,573,850.00 | 11,125,631.00 |
| 21 | Dinas Kehutanan | 8,624,050.00 | 12,428,045.00 | 13,438,186.00 | 12,547,046.00 |
| 22 | Dinas Energi & Sumberdaya Mineral | 6,301,123.00 | 93,322,157.00 | 102,967,124.75 | 112,739,307.75 |
| 23 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 16,440,200.00 | 18,084,220.00 | 19,892,642.00 | 21,881,906.00 |
| 24 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 12,274,915.00 | 83,300,685.00 | 65,419,404.00 | 47,453,723.00 |
| TOTAL KELOMPOK PRIORITAS I | | 921,148,676.06 | 1,276,146,234.26 | 1,311,137,280.66 | 1,376,060,955.54 |
| | KELOMPOK PRIORITAS II | | | | |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | | |
| | Biro Ekonomi | 5,281,680.00 | 6,630,445.00 | 7,648,217.00 | 9,193,759.00 |
| | Biro Administrasi Pembangunan | 5,645,851.64 | 6,580,505.18 | 7,309,696.78 | 8,708,701.92 |
| | Biro Administrasi Pemerintahan | 4,763,859.00 | 5,240,245.00 | 5,764,269.00 | 6,340,696.00 |
| | Biro Umum | 91,851,041.00 | 103,476,698.00 | 118,306,452.00 | 135,964,796.00 |
| | Biro Humas dan PDE | 2,946,475.00 | 2,893,733.00 | 3,085,965.00 | 3,297,422.50 |
| | Biro Kesra | 11,402,000.00 | 8,775,500.00 | 12,520,500.00 | - |
| | Biro Organisasi & Tata Laksana | 5,518,864.00 | 6,419,365.00 | 7,419,775.00 | 8,655,091.00 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 51,851,903.00 | 52,390,661.00 | 43,861,370.00 | 43,861,370.00 |
| 3 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 15,472,684.28 | 13,677,744.90 | 15,045,519.39 | 16,550,071.33 |
| 4 | BALITBANGDA | 4,418,605.00 | 5,746,675.50 | 4,326,570.35 | 5,094,505.35 |
| 5 | Inspektorat Provinsi | 5,401,722.00 | 4,166,154.00 | 4,183,700.00 | 4,293,900.00 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015-2018

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6 | Dinas Pendapatan Daerah | 14,267,218.00 | 20,396,275.00 | 34,200,800.00 | 35,463,590.00 |
| 7 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 9,024,062.00 | 14,908,772.00 | 15,709,557.00 | 9,856,675.00 |
| 8 | Badan Kepegawaian Daerah | 4,501,233.00 | 5,173,418.00 | 5,946,432.00 | 6,835,398.00 |
| 9 | Sekretariat KPID | 4,572,850.00 | 4,526,500.00 | 4,766,900.00 | 5,243,590.00 |
| 10 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | 1,554,640.00 | 3,864,240.00 | 3,525,156.50 | 4,116,680.00 |
| 11 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 20,547,063.00 | 21,118,970.00 | 10,994,500.00 | 11,084,500.00 |
| 12 | Badan Ketahanan Pangan | 8,959,248.00 | 6,124,350.00 | 5,733,680.00 | 6,295,095.00 |
| 13 | Badan Kesatuan Bangsa & Politik | 1,956,854.00 | 2,860,000.00 | 3,303,375.00 | 3,785,800.00 |
| 14 | Satuan Polisi Pamong Praja | 11,616,107.00 | 13,942,700.00 | 48,190,000.00 | 23,034,300.00 |
| TOTAL KELOMPOK PRIORITAS II | | 281,553,959,92 | 308,912,951.58 | 361,842,435.02 | 347,675,941.10 |

Sumber Renstra SKPD Prov. Sultra (diolah Tahun 2015-2018)